

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP FISKUS,
KEMANFAATAN NPWP, *TAX AVOIDANCE* DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Surakarta)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

Oleh:

**SHEILA SAFIRA MAHARANI
B 200 170 203**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP FISKUS, KEMANFAATAN NPWP, *TAX AVOIDANCE*, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kota
Surakarta)**

Oleh:

SHEILA SAFIRA MAHARANI
B 200 170 203

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Surakarta, 17 Juli 2021

Dosen Pembimbing



Dra. Nursiam., M.H., Ak., CA
NIDN. 0624096401

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP FISKUS,
KEMANFAATAN NPWP, *TAX AVOIDANCE*, DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP
Pratama Kota Surakarta)**

Oleh:

SHEILA SAFIRA MAHARANI

B 200 170 203




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 17 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dra. Nursiam., M.H., Ak., CA (Ketua Dewan Penguji) ()
2. Dra. Rina Trisnawati., M.Si., Ak., Ph.D., CA (Anggota I Dewan Penguji) ()
3. Drs. Suyatmin W A., M.Si (Anggota II Dewan Penguji) ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Anton Agus Setiawan, S.E., M.Si
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka,.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Juli 2021



SHEILA SAFIRA MAHARANI
B 200 170 203

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP FISKUS,
KEMANFAATAN NPWP, *TAX AVOIDANCE* DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Surakarta)**

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap fiskus, kemanfaatan NPWP, *tax avoidance*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Surakarta. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 responden dengan teknik *accidental sampling*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan instrument kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression analysis*) dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap fiskus, kemanfaatan NPWP, dan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Surakarta.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, sikap fiskus, kemanfaatan NPWP, *tax avoidance*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of taxation knowledge, tax authorities attitudes, benefit of NPWP, tax avoidance, and modernization of the tax administration system on the compliance of taxpayers registered at KPP Pratama Surakarta. This study took a sample of 100 respondents with accidental sampling technique. The approach used in this study is a qualitative approach. Data were collected by means of a questionnaire as measured by a Likert scale. The data analysis used was multiple linear regression analysis using SPSS version 26 program. The results showed that knowledge of taxation and modernization of the tax administration system had an effect on taxpayer compliance, while the tax authorities attitudes, benefit of NPWP, and tax avoidance did not effect on the compliance of taxpayers registered at the KPP Pratama Surakarta.

Keywords: taxation knowledge, tax authorities attitudes, benefit of NPWP, tax avoidance, and modernization of the tax administration system and taxpayer compliance.

1. PENDAHULUAN

Tingkat kesejahteraan suatu negara yang tinggi selalu diiringi dengan pesatnya tingkat pembangunan nasional. Kedua hal tersebut merupakan hal yang

saling berkesinambungan dalam mempengaruhi kehidupan suatu negara. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak lepas dari masalah pembiayaan. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dana tersebut akan terus meningkat seiring dengan besarnya kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pemerintah harus mencari jalan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunannya disamping dengan sumber dana yang mereka miliki.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih maju yaitu penarikan pajak. Menurut Prof Dr. P. J. A. Andriani (dalam Meliala, 2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan UU yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia yang sifatnya memaksa dan manfaat yang didapatkan tidak diterima secara langsung.

Optimalisasi penerimaan pendapatan negara selalu diupayakan oleh pemerintah melalui pemungutan pajak untuk mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan pinjaman dana dari luar negeri. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri masih dianggap rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Kota Bengawan dinilai rendah. Dari 139.000 wajib pajak (WP) yang terdaftar hanya 21% yang aktif bayar pajak. (Radar Solo, 2020). Catatan KPP Pratama Surakarta, per 1 Maret 2020, baru 13.502 wajib pajak melaporkan SPT pajak khusus untuk orang pribadi (OP) karyawan atau sebesar 35,61%. Sedangkan untuk orang pribadi (OP) nonkaryawan sekitar 2.557 wajib pajak atau 20,18%.

Seluruh wajib pajak berdasarkan *self assessment system* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus mendapatkan NPWP. NPWP adalah identitas wajib pajak

yang digunakan sebagai sarana untuk keperluan administrasi perpajakan. Dengan adanya kepemilikan NPWP diharapkan agar masyarakat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tetapi hal itu masih sangat ironi bagi masyarakat Indonesia. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat sesuai kepentingan wajib pajak. Dengan begitu wajib pajak dapat termotivasi untuk patuh memiliki NPWP serta patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya (Rahmawati, 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak melaporkan SPT karena mereka beranggapan bahwa pajak hanyalah beban. Sejauh ini telah banyak wajib pajak badan maupun orang pribadi memilih melakukan upaya *tax planning* untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. *Tax planning* yang dilakukan berupa praktek penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini menimbulkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Nuralifmida, 2012). *Tax avoidance* dianggap legal karena masih diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih sangatlah kurang, karena minimnya pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga para wajib pajak kurang paham akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, tarif pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Jessica, 2020). Pemahaman membayar pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan. Wajib pajak mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui fiskus. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, media sosial, seminar perpajakan maupun pelatihan-pelatihan (Hadi, 2017). Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dengan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menciptakan suatu pelayanan mandiri berbasis internet atau *e-system* antara lain *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Registration*, *e-Counseling*, *Taxpayer's Account*, *e-Payment*.

Penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Bayu C, Heru S, dan Zahroh Z.A (2015) menunjukkan hasil yang sama. Variabel sikap fiskus dalam penelitian Jenita H dan Joana L.S (2017) menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam penelitian Johanes H.T, Jullie J.S, dan Jessy D.I (2017) menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kemanfaatan NPWP dalam penelitian Ainil Huda (2015) menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam penelitian Sri Rahmawati (2015) menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *tax avoidance* dalam penelitian Shinung Sakti H dan Siti Ragil H (2016) menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Davidya F dan Tri Sulistyani (2018) variabel *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini (2017) serta Ni Luh P.D dan Putu Ery (2017) menunjukkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian I Gede Darmayasa dan Putu Ery (2016) menunjukkan hasil yang berbeda. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian. Maka judul skripsi ini adalah **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Fiskus, Kemanfaatan NPWP, Tax Avoidance dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak dan wajib pajak KPP Pratama Surakarta sebanyak 184.104 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, dimana sampel yang dipilih adalah siapa saja yang secara kebetulan bertemu dan dapat dijangkau dalam jangka waktu dari 11 April 2021-21 April 2021. Rumus *Slovin* digunakan untuk mengukur jumlah serta ukuran sampel, sehingga diperoleh 100 sampel penelitian.

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen penelitian adalah pengetahuan perpajakan, sikap fiskus, kemanfaatan NPWP, *tax avoidance*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji instrumen meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, sedangkan uji hipotesis meliputi uji R^2 , uji t, uji F, dan regresi linier berganda,.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Jumlah minimal responden ditentukan dengan Rumus *Slovin*. Dengan menggunakan *accidental sampling* dari 11 April 2021 - 21 April 2021 didapatkan jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 100 responden.

Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) variabel yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
PP	100	9	20	16,02	0,236	2,357
SF	100	8	15	12,69	0,172	1,716
KN	100	11	20	16,52	0,229	2,294
TA	100	4	20	13,60	0,294	2,944
MSAP	100	12	20	17,39	0,196	1,959
KWP	100	6	20	16,42	0,270	2,697
Valid N (listwise)	100					

(Sumber : data primer, diolah, 2021)

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa N merupakan jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Nilai minimum adalah nilai skor terendah, sedangkan nilai maksimum adalah nilai skor tertinggi, mean adalah rata-rata dari nilai maksimum dan nilai minimum, sedangkan standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Apabila tingkat standar deviasi semakin tinggi berarti jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin bervariasi (heterogenitas). Sebaliknya, apabila tingkat standar deviasi semakin rendah, berarti jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin homogeny atau variasi jawaban responden semakin kecil.

Hasil perhitungan statistik deskriptif selanjutnya variabel Pengetahuan Perpajakan (PP) memiliki nilai minimum 9, maksimum 20. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel pengetahuan perpajak sebesar 16,02 dan nilai standar deviasi sebesar 2,357. Variabel Sikap Fiskus (SF) memiliki nilai minimum 8, maksimum 15. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel sikap fiskus sebesar 12,69 dengan standar deviasi sebesar 1,716. Variabel Kemanfaatan NPWP (KN) memiliki nilai minimum 11, maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel kemanfaatan NPWP sebesar 16,52 dengan standar deviasi pada variabel kemanfaatan NPWP sebesar 2,294. Variabel *Tax Avoidance* (TA) memiliki nilai minimum 4, maximum 20, nilai rata-rata. sebesar 13,60 dengan nilai standar deviasi variabel

tax avoidance sebesar 2,944 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menunjukkan nilai minimum 12, maximum 20, mean 17,39 dengan standar deviasi sebesar 1,959. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan nilai minimum 6, maximum 20, mean 16,42 dengan standar deviasi sebesar 2,697.

Uji Normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data pada penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan CLT (*Central Limit Theorem*) yaitu jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Penelitian ini dengan jumlah n sebesar $100 > 30$. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan terdistribusi normal dan dapat disebut sampel besar.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan	0,654	1,529	Tidak terjadi multikolinearitas
Sikap Fiskus	0,616	1,624	Tidak terjadi multikolinearitas
Kemanfaatan NPWP	0,475	2,104	Tidak terjadi multikolinearitas
Tax Avoidance	0,922	1,085	Tidak terjadi multikolinearitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,489	2,046	Tidak terjadi multikolinearitas

(Sumber : data primer, diolah, 2021)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel tidak terjadi gejala multikolinearitas karena memiliki *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dapat dikatakan baik dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,742	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sikap Fiskus	0,736	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kemanfaatan NPWP	0,826	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<i>Tax Avoidance</i>	0,884	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,71	Tidak terjadi heteroskedastisitas

(Sumber : data primer, diolah 2021)

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *rank spearman* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%, maka dapat diartikan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.686 ^a	.470	.442	2.01440	1.785

(Sumber: data primer, diolah 2021)

Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,785 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,780 dan kurang dari (4 - dU) $4 - 1,780 = 2,220$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian hasil regresi di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Tabel 5. Hasil Model Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	thitung	Signifikansi
Pengetahuan Perpajakan	0,478	0,106	4,501	0,000

Sikap Fiskus	-0,201	0,153	-1,320	0,190
Kemanfaatan NPWP	0,120	0,128	0,937	0,351
<i>Tax Avoidance</i>	-0,100	0,072	-1,394	0,167
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,615	0,148	4,160	0,000

Hasil pengujian model regresi di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,005 + 0,478.PP - 0,210.SF + 0,120.KN - 0,100.TA + 0,615.MSAP + \varepsilon$$

3.1.2 Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel diatas maka nilai F (16,705) dengan Sig. 0.000 lebih kecil dari tingkat kesalahan alpha (0.05), sehingga variabel Pengetahuan Perpajakan, Sikap Fiskus, Kemanfaatan NPWP, *Tax Avoidance*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 6. Uji Statistik t

Variabel	t	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	4,501	0,000	H1 signifikan
Sikap Fiskus	-1,320	0,190	H2 tidak signifikan
Kemanfaatan NPWP	0,937	0,351	H3 tidak signifikan
<i>Tax Avoidance</i>	-1,394	0,167	H4 tidak signifikan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	4,160	0,000	H5 signifikan

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan mempunyai sisgnifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan yaitu $0.000 < 0.05$. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kedua diketahui bahwa variabel siklus fiskus mempunyai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan yaitu $0.190 > 0.05$. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa variabel siklus fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga diketahui bahwa variabel kemanfaatan NPWP mempunyai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan yaitu $0.351 > 0.05$. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa variabel kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga diketahui bahwa variabel *tax avoidance* mempunyai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan yaitu $0.167 > 0.05$. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa variabel *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keempat diketahui bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan yaitu $0.000 < 0.05$. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka adjusted R^2 diperoleh nilai sebesar 0.442. Hal ini berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Sikap Fiskus, Kemanfaatan NPWP, *Tax Avoidance*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 44,2%. Sedangkan sisanya 55.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji pengetahuan perpajakan bahwa nilai koefisien 0,478 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan antara lain seperti memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan dan dengan suka rela menerapkannya untuk memenuhi kewajiban

perpajakan seperti, mendaftarkan untuk mendapat NPWP, membayar pajak, melaporkan SPT, kewajiban dalam pemeriksaan, dan kewajiban memberikan data. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak cenderung akan turut berkontribusi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan penelitian Bayu Caroko, Heru Susilo, dan Zahroh Z.A (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji sikap fiskus bahwa nilai koefisien 0,190 dengan nilai signifikansi $0,190 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan baik atau buruknya sikap fiskus terhadap wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap fiskus tidak efektif dalam usaha kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap fiskus bukanlah faktor utama dari kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Johanes, Jullie, dan Jessy (2017), menyatakan bahwa sikap fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian Jenita dan Joana (2017) yang menunjukkan bahwa sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji kemanfaatan NPWP bahwa nilai koefisien 0,120 dengan tingkat signifikansi $0,351 > 0,05$ artinya bahwa variabel kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas atau pengenalan diri yang wajib dimiliki oleh wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Sebagian besar wajib pajak mengetahui NPWP hanya sebagai identitas bahwa telah terdaftar sebagai wajib pajak saja. Sebenarnya terdapat berbagai manfaat yang diperoleh atas kepemilikan NPWP antara lain seperti kemudahan urusan perpajakan terkait dengan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pajak, pemotongan pajak yang

rendah dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, kemudahan pengurusan administrasi terkait dengan kredit bank, rekening dana nasabah (RDN), rekening efek, rekening bank, pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan pembuatan paspor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sri Rahmawati (2015) yang menunjukkan hasil bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak mendukung penelitian Ainil Huda (2015) yang menunjukkan hasil bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji *tax avoidance* menunjukkan nilai koefisien -0,100 dengan tingkat signifikansi $0,167 > 0,05$ dapat disimpulkan variabel *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya pengaruh *tax avoidance* terhadap kepatuhan wajib pajak, berarti *tax avoidance* tidak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena *tax avoidance* adalah upaya mengurangi utang pajak dengan cara meminimalkan beban pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ferry dan Waluyo (2019) yang menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak mendukung penelitian Shinung, Kertahadi, dan Siti (2016) yang menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji modernisasi sistem bahwa nilai koefisien 0,615 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dapat diambil kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan yang telah modern akan membawa pengaruh yang besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal perpajakan. Efektif dan efisien merupakan bentuk dari sistem yang sudah modern. Seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan melalui jaringan internet yang berbasis *online*. Semakin baik sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hadi Wiranatha dan Ni Ketut R (2017) yang menunjukkan hasil bahwa modernisasi

sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak mendukung penelitian I Gede Darmayasa dan Putu Ery (2016) yang menunjukkan hasil bahwa modernisasi sitem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada KPP Pratama Surakarta maka dapat disimpulkan bahwa pertama pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kedua sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ketiga kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, keempat *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kelima modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain terkendala ketika penyebaran kuisioner yang dilakukan pada masa pandemi yang menyebabkan responden sulit untuk dijangkau karena wajib pajak yang datang mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terbatas. Uji normalitas menggunakan uji CLT (*Central Limit Theorem*) yaitu jika jumlah obesvasi cukup besar ($n > 30$), artinya uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorof-Smirnov Z dapat diabaikan, dengan kata lain penelitian ini hanya dapat disimpulkan pada sampel penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, Veronica. (2009). Pengetahuan Pajak. Mawardi, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 6. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar. (2003). Ekonometrika Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*). Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4, No.5, Hal.4-9.

- Hadi. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Tax Amnesty*, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. Vol. 21 (3): 2395-2424.
- Hermawan, Rhondy. (2020). "*Detterence Theory*". Dalam Kompasiana, 12 Januari 2020. Jakarta
- Hutagol, J., Darussalam & Danny, S. (2007). Kapita Selekta Perpajakan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jessica P. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Mekanisme Pembayaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Kota Palembang [Skripsi]. Palembang: STIE Multi Data.
- Ken Devos. (2007). "*Measuring and Analysing Detterence in Taxpayer Compliance Research*". Journal of Australian Taxation, Vol. 15 No. 2, hal 5-24.
- Kiswara, Endang dan Saraswati, Prita. (2011). *Journal of Accounting* "Analisi terhadap Penerapan *Theory of Consumer Acceptance Technology* pada E-SPT". Vol 2 No 2, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, (2009). "Perpajakan". Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta
- Masruroh, Siti. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 2 No 4.
- Meliala, Tulis, Francisca W. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak edisi 4. Jakarta: Semesta Media.
- Noorina A. (2017). Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pelatihan Terhadap Pengetahuan Aparatur Pajak Tentang *Tax Avoidance* [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nugroho, Agus. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Nuralifmida A, Lulus K. (2012). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 8(2): 95-189.
- Perdana. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak di Solo Jeblok, Cuma 21 Persen Aktif Bayar Pajak. Dalam *Radar Solo*, 4 Maret 2020. Solo.
- Pohan, Chairil Anwar Drs. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Gava Media. Yogyakarta.
- Prambudi, BS dan Ahmad. (2014). *Jurnal Studi Manajemen* “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Ketersediaan Fitur terhadap Minat Ulang Nasab Bank dalam Menggunakan Internet Banking (Studi pada Program Layanan Internet Banking BRI)”. Vol 8 No 1. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Rahmawati, Sri., (2015). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jom FEKON*. 2(2).
- Rahman., Adi., & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Jurnal of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-11*. Semarang.
- Sakti, Shinung. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 9 No 1.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2010). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Wiranatha., Hadi., Ni Ketut., (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Tax Amnesty*, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. 21(3): 2395-2424.